

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Sistem keuangan internasional saat ini masih didominasi oleh Amerika Serikat, terutama melalui peran dolar dalam perdagangan global serta kontrol AS terhadap infrastruktur pembayaran internasional seperti SWIFT, Visa, dan Mastercard. Dominasi ini menciptakan ketergantungan struktural bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam penyelesaian transaksi lintas batas dan aliran data keuangan.<sup>1</sup> Dalam struktur global, dominasi Amerika Serikat tidak hanya terlihat dari penggunaan dolar, tetapi juga dari tiga pilar utama sistem keuangan internasional, yaitu sistem moneter internasional, sistem pembayaran global, dan sistem keuangan internasional. Kemudian pada level moneter, dolar berfungsi sebagai mata uang cadangan dan alat penyelesaian utama, sehingga kebijakan moneter AS berpengaruh langsung terhadap stabilitas negara berkembang.<sup>2</sup> Pada level pembayaran, infrastruktur seperti SWIFT, CHIPS, Visa, dan Mastercard berada di bawah AS, membuat arus transaksi lintas negara harus melalui jaringan yang dikendalikan aktor eksternal. Sementara itu, pada level sistem keuangan internasional, pasar modal dan likuiditas global di Amerika Serikat, sehingga memberi AS pengaruh struktural dalam menentukan standar dan arus

<sup>1</sup> J.P. Morgan Research, "De-dollarization: The End of Dollar Dominance?," J.P. Morgan, December 4, 2025, <https://www.jpmorgan.com/insights/global-research/currencies/de-dollarization>.

<sup>2</sup> Eswar Prasad, "Enduring Preeminence," *Finance & Development* 59, no. 2 (June 2022): 6-10, <https://www.imf.org/en/Publications/fandd/issues/2022/06/enduring-preeminence-eswar-prasad>.

modal internasional. Ketiga struktur ini menjadi sumber utama ketergantungan Indonesia terhadap sistem keuangan global berbasis dolar.<sup>3</sup>

Kemudian negara-negara berkembang, menghadapi dominasi Amerika Serikat dalam struktur keuangan global, baik melalui posisi dolar dalam sistem moneter internasional maupun kontrol AS atas infrastruktur pembayaran global.<sup>4</sup> Ketergantungan Indonesia tidak hanya terjadi pada penggunaan dolar, tetapi juga pada infrastruktur pembayaran global yang dikendalikan perusahaan AS seperti Visa dan Mastercard, serta jaringan SWIFT yang menguasai lebih dari 90% transfer lintas negara. Kondisi ini membatasi kedaulatan sistem pembayaran Indonesia karena data, biaya transaksi, dan proses settlement masih bergantung pada jaringan asing.<sup>5</sup> Pada Sistem jaringan Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) dengan menguasai 95% transfer internasional yang menghubungkan dengan 200 negara, maka hal ini dapat membuat arus data dan biaya transaksi tidak dapat dikontrol oleh pemerintah nasional.<sup>6</sup> Dalam konteks ini, financial statecraft menjadi penting sebagai kerangka yang menjelaskan bagaimana negara menggunakan instrumen keuangan untuk melindungi kepentingan nasional (defensif) sekaligus memperluas pengaruhnya

<sup>3</sup> Joshua Kurlantzick, "Southeast Asia's Quiet Revolt Against the Dollar: Should the US Be Worried?" *The Diplomat*, April 18, 2025, <https://thediplomat.com/2025/04/southeast-asias-quiet-revolt-against-the-dollar-should-the-us-be-worried/>

<sup>4</sup> E. Siswati, "Dampak Kerjasama BRICS terhadap Dominasi Nilai Dolar AS," *Jurnal DGSJ* (2022), <https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/DGSJ/article/download/2857/526>.

<sup>5</sup> Redaksi JBEP, "Dampak QRIS terhadap Kedaulatan Digital," *Jurnal Bisnis Ekonomi dan Pembangunan* (2025): 5-7, <https://ejournal.areai.or.id/index.php/JBEP/article/download/1032/1304/5383>

<sup>6</sup> Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT). (2025). Sejarah dan fungsi SWIFT. Diakses dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Society\\_for\\_Worldwide\\_Interbank\\_Financial\\_Telecommunications](https://id.wikipedia.org/wiki/Society_for_Worldwide_Interbank_Financial_Telecommunications)

(ofensif).<sup>7</sup> Instrumen keuangan bukan hanya sebagai mekanisme ekonomi teknis, tetapi juga alat kekuasaan yang efektif dalam persaingan geopolitik dan ekonomi global.<sup>8</sup> ASEAN sendiri mendorong integrasi sistem pembayaran melalui inisiatif *ASEAN Payments Connectivity* (APC) dan *Local Currency Settlement* (LCS). Kedua kebijakan ini bertujuan mengurangi ketergantungan negara kawasan pada dolar AS dalam transaksi lintas batas dan memperkuat penggunaan mata uang lokal.<sup>9</sup>

Kemudian Kerjasama *Local Currency Settlement Framework* (LCSF) bertujuan untuk mendorong penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan dan investasi antara dua negara anggota melalui ASEAN.<sup>10</sup> Indonesia berupaya mempercepat integrasi finansial ASEAN melalui inovasi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS), yang telah digunakan dengan baik di Indonesia sejak pertengahan tahun 2019. Dihadirkan pada pandemi COVID-19, digitalisasi untuk mengurangi interaksi fisik sangat penting, yang menghasilkan keberhasilan QRIS di Indonesia. QRIS dapat dilakukan untuk melakukan transaksi dengan setiap *e-wallet* dengan menggunakan satu kode QR (*Quick Response*). Infrastruktur pendukung utama QRIS yaitu Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang diluncurkan Bank Indonesia pada 2017. GPN berfungsi sebagai switching

<sup>7</sup> Leslie Elliott Armijo and Saori N. Katada, "Theorizing the Financial Statecraft of Emerging Powers," *New Political Economy* 20, no. 1 (2015): 42–62, <https://www.leslieelliottarmijo.org/wp-content/uploads/2018/08/Theorizing-the-Financial-Statecraft-of-Emerging-Powers.pdf>.

<sup>8</sup> Leslie Elliott Armijo and Saori N. Katada, "Theorizing the Financial Statecraft of Emerging Powers," in Theorizing the Financial Statecraft of Emerging Powers, ed. Leslie Elliott Armijo and Saori N. Katada (New York: Routledge, 2014), 45-51, <https://www.leslieelliottarmijo.org/wp-content/uploads/2018/08/Theorizing-the-Financial-Statecraft-of-Emerging-Powers.pdf>.

<sup>9</sup> Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), *Integrating Digital Payments in ASEAN*, ERIA Policy Brief no. 2024-13 (Jakarta: ERIA, January 2025), 2-5, <https://www.eria.org/uploads/Integrating-Digital-Payments-in-ASEAN.pdf>.

<sup>10</sup> R. A. Pratama, "Implementation of Local Currency Settlement (LCS) between Indonesia, Malaysia, and Thailand," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 4 (2024): 808–816, <https://doi.org/10.5281/zenodo.10533243>.

domestik yang memastikan transaksi QRIS diproses sepenuhnya dalam ekosistem finansial Indonesia. Dengan demikian, tidak hanya antarmuka pembayaran yang dimiliki nasional, tetapi juga infrastruktur pemrosesan data yang bebas dari ketergantungan pada jaringan internasional.<sup>11</sup> Kemudian Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia (BI) sebagai Bank Sentral Indonesia memutuskan untuk memperluas layanan QRIS dengan bekerja sama dengan negara-negara ASEAN sebagai hasil dari keberhasilannya di Indonesia. Indonesia mendukung QRIS, yang dianggap sebagai momentum penting dalam upaya integrasi keuangan ASEAN.<sup>12</sup>

Untuk menerapkan kerja sama QRIS Cross-Border, dari tahun 2022 hingga akhir tahun 2024, Indonesia bekerja sama dengan empat negara utama dengan tingkat progresivitas yang berbeda telah bekerja sama. Thailand sebagai mitra pertama yang menerima integrasi penuh QRIS PromptPay, yang dirilis pada Agustus 2022. Pada November 2022, Malaysia menerima konektivitas QRIS DuitNow. Sekarang beroperasi, kedua kolaborasi ini menggunakan mekanisme *Local Currency Settlement* (LCS), yang memungkinkan transaksi tanpa perantara USD antara Rupiah dan Baht. Sementara itu, Singapura bermaksud untuk bergabung dengan sistem PayNow pada tahun 2024, Kemudian Filipina bergabung dengan InstaPay pada tahun 2025. Keempat negara ini dipilih berdasarkan faktor strategis seperti volume perdagangan dan lokasi geografis mereka.<sup>13</sup> Kemudian

---

<sup>11</sup> Permata, S., & Dhakiri, A. (2024). Win-Win Solution QRIS Cross-Border: Mendorong Integrasi Keuangan ASEAN dan Diplomasi Ekonomi Digital Indonesia. Bank Indonesia. Diakses dari <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/win-win-solution-qris-cross-border.aspx>

<sup>12</sup> Bank Indonesia. (2024). Sejarah QRIS di Indonesia dan Manfaatnya Hingga Kini. Diakses dari <https://www.dbs.id/digibank/id/id/articles/sejarah-qris-di-indonesia-dan-manfaatnya-hingga-kini>

<sup>13</sup> Bank Indonesia. (2024). Win-Win Solution QRIS Cross-Border. Diakses dari <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/win-win-solution-qris-cross-border.aspx>

Indonesia berhasil memperluas jangkauannya ke Jepang sebagai mitra non ASEAN pertama. Bahkan, uji coba dan negosiasi sedang dilakukan untuk perluasan ke China, Korea Selatan, India, dan Arab Saudi.<sup>14</sup>

Keberhasilan QRIS tidak hanya berdampak pada domestik, tetapi juga menarik perhatian internasional. Pada tahun 2025, *United States Trade Representative* (USTR) melalui laporan *National Trade Estimate* (NTE) 2025 secara resmi mengkritik kebijakan QRIS dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) Indonesia sebagai hambatan perdagangan digital. AS menilai kebijakan ini membatasi akses perusahaan pembayaran AS seperti Visa dan Mastercard melalui persyaratan kepemilikan lokal dan kemitraan dengan entitas domestik.<sup>15</sup> Dengan demikian, QRIS Cross-Border bukan hanya sebagai inovasi teknologi, namun instrument untuk memperkuat efisiensi dan inklusi keuangan lintas batas Indonesia dalam meningkatkan otonomi sistem pembayaran dan memperkuat posisi dalam sistem pembayaran internasional serta mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi lintas batas.<sup>16</sup>

## 1.2 Rumusan Masalah

Dominasi dolar Amerika Serikat dalam sistem keuangan internasional telah menciptakan ketergantungan struktural bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia, baik dalam penyelesaian transaksi lintas batas, penggunaan infrastruktur pembayaran global, maupun pengelolaan arus data keuangan. Ketergantungan ini

<sup>14</sup> Bank Indonesia, "QRIS Melangkah ke Jepang, Layanan Pembayaran Digital Indonesia Kini Resmi Hadir di Negeri Sakura," 17 Agustus 2025, <https://qrис.interactive.co.id/homepage/blog-detail.php?lang=en&page=MjEx-qrис-melangkah-ke-jepang-layanan-pembayaran-digital-in>.

<sup>15</sup> United States Trade Representative. (2025). National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers 2025. <https://ustr.gov>

<sup>16</sup> Bank Indonesia, "Win-Win Solution QRIS Cross-Border," Februari 2024, <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/win-win-solution-qrис-cross-border.aspx>.

membatasi ruang kedaulatan moneter Indonesia dan memperlihatkan perlunya instrumen nasional yang mampu mengurangi dominasi jaringan pembayaran asing seperti Visa, Mastercard, dan SWIFT yang masih mendominasi transaksi internasional Indonesia. Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, Bank Indonesia mengembangkan QRIS Cross-Border sebagai inisiatif pembayaran digital yang terhubung melalui mekanisme *Local Currency Settlement* (LCS). Namun, sejauh mana kemampuan QRIS Cross-Border sebagai bagian dari strategi *financial statecraft* Indonesia dalam memperluas penggunaan mata uang lokal, serta memperkuat otonomi sistem pembayaran Indonesia dan mengurangi ketergantungan pada Amerika Serikat.

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Dari penjelasan rumusan masalah dan latar belakang diatas, pertanyaan penelitian yang dijawab, yaitu “Bagaimana Qris Cross-Border sebagai *financial statecraft* Indonesia terhadap dominasi Amerika Serikat dalam sistem keuangan internasional?”

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk menganalisis Bagaimana Qris Cross-Border sebagai *financial statecraft* Indonesia terhadap dominasi Amerika Serikat dalam sistem keuangan internasional.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Dalam ranah akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam studi Hubungan Internasional, terkait kajian ekonomi politik global dan dinamika sistem moneter internasional. Penelitian ini

dapat menjadi dasar pemahaman yang lebih mendalam mengenai penggunaan QRIS Cross-Border sebagai instrument negara dalam mengurangi ketergantungan pada infrastruktur pembayaran global berbasis dolar AS. Selain itu, penelitian ini memperkaya literatur terkait penerapan teori *Financial Statecraft* untuk menjelaskan bagaimana negara-negara berkembang, seperti Indonesia merespon dominasi sistem moneter global yang hierarkis.

2. Dalam aspek praktis, penelitian ini dijadikan sebagai bahan diskusi lanjutan bagi pembuat kebijakan, pelaku industri keuangan dan masyarakat umum, memperluas penggunaan mata uang lokal dan mengurangi ketergantungan pada mata uang serta jaringan pembayaran asing. Dengan demikian penelitian ini memberikan wawasan strategis bagi Bank Indonesia, negara-negara ASEAN dan pelaku usaha dalam mengembangkan dan memperkuat sistem pembayaran digital nasional dan regional yang inklusif.

## 1.6 Studi Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, penulis merujuk pada beberapa referensi yang dinilai relevan dan sesuai dengan topik yang akan diteliti. Referensi ini akan digunakan untuk menganalisis mencari jawaban dari penelitian. Adapun literatur tersebut yaitu:

Referensi pertama merujuk pada artikel jurnal berjudul "*Peran QRIS dan GPN Sebagai Instrumen Kedaulatan Digital Indonesia dalam Menanggapi Tekanan Dagang Amerika Serikat*" oleh Saleh, S.R dan Marzaman. Artikel ini menjelaskan QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) dan Gerbang Pembayaran

Nasional (GPN) dalam memperkuat kedaulatan digital nasional Indonesia yang melihat bagaimana kebijakan pembayaran digital nasional hadir tidak hanya sebagai inovasi teknologi, tetapi sebagai respon strategis terhadap tekanan perdagangan yang diluncurkan oleh Amerika Serikat, melalui laporan *National Trade Estimate (NTE) 2025* oleh *United States Trade Representative (USTR)*. Dalam laporan tersebut, AS mengkritik kebijakan QRIS dan GPN sebagai hambatan perdagangan digital karena pembatasan kepemilikan asing serta kewajiban kemitraan dengan entitas lokal, yang dianggap menghalangi akses perusahaan asing. QRIS dan GPN memiliki peran fundamental dalam mengurangi ketergantungan Indonesia pada infrastruktur pembayaran global yang dikuasai oleh perusahaan Barat seperti Visa dan Mastercard, yang tidak hanya mengenakan biaya transaksi yang tinggi, tetapi juga mengendalikan data transaksi melalui jaringan *proprietary* mereka. Dengan mengadopsi QRIS dan GPN, Indonesia berhasil mentransfer aliran transaksi digital ke dalam negeri melalui Gerbang Pembayaran Nasional, sehingga memperkuat kendali nasional atas data strategis dan mengurangi risiko kebocoran informasi yang dapat membahayakan kedaulatan ekonomi. Selain itu, QRIS membuat transaksi digital menjadi lebih inklusif dan terjangkau, khususnya bagi kelompok UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Kemudian QRIS dan GPN tidak hanya memperkuat ketahanan ekonomi digital Indonesia secara domestik, tetapi juga berperan dalam diplomasi ekonomi digital tingkat regional. Melalui integrasi sistem pembayaran lintas batas dalam kawasan ASEAN dan partisipasi dalam proyek multilateral seperti *Nexus*, Indonesia secara aktif membangun blok regional terhadap dominasi korporasi multinasional dan sistem keuangan global. Strategi ini memperlihatkan upaya

kolektif untuk mempertahankan kedaulatan ekonomi digital di tengah tekanan globalisasi dan intervensi geopolitik.<sup>17</sup> Artikel ini berkontribusi untuk penulis sebagai upaya strategis Indonesia dalam mengurangi ketergantungan pada sistem pembayaran global yang dikendalikan aktor Barat, serta menjadi bagian dari strategi kedaulatan digital Indonesia dalam menghadapi tekanan geopolitik Amerika Serikat.

Referensi kedua merujuk pada artikel jurnal berjudul "*Peluang Indonesia sebagai Ketua ASEAN Tahun 2023 dalam Mempromosikan Penggunaan Local Currency Settlement dan QR Code Lintas Batas terkait Transaksi Perdagangan di Asia Tenggara*" yang ditulis oleh Jason Fernando & Ezra Yora Turnip 2023.<sup>18</sup> Artikel ini membahas bagaimana Indonesia, dalam posisinya sebagai Ketua ASEAN pada tahun 2023, menggunakan kesempatan tersebut untuk mendorong penggunaan *Local Currency Settlement* (LCS) dalam transaksi lintas negara di kawasan Asia Tenggara. Artikel ini menjelaskan bagaimana melalui pengembangan sistem pembayaran QR Code lintas batas QRIS Cross-Border, Indonesia berhasil memperkuat koneksi perdagangan antar negara anggota ASEAN. Penerapan LCS dalam sistem pembayaran ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS sebagai mata uang perantara dalam transaksi internasional. Penulis juga mengungkapkan bagaimana kebijakan ini tidak hanya dapat mengurangi biaya transaksi lintas batas, tetapi juga memberikan negara-negara ASEAN lebih banyak

---

<sup>17</sup> Saleh, S. R., dan Marzaman, "Peran QRIS dan GPN sebagai instrumen kedaulatan digital Indonesia dalam menanggapi tekanan dagang Amerika Serikat," *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 8, no. 7 (2025):2-7, <https://ejournal.cahayailmubangsa.institute/index.php/triwikrama/article/view/892/785>

<sup>18</sup> Fernando, J., & Turnip, E. Y. (2023). Peluang Indonesia sebagai Ketua ASEAN Tahun 2023 dalam Mempromosikan Penggunaan Local Currency Settlement dan QR Code Lintas Batas terkait Transaksi Perdagangan di Asia Tenggara. *Sentriss: Jurnal Ilmu Sosial*, 4(2). Diakses dari <https://journal.unpar.ac.id/index.php/Sentriss/article/view/7124>

kendali atas arus keuangan mereka serta mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan.<sup>19</sup> Artikel ini berkontribusi untuk penulis dalam memberikan pemahaman mengenai signifikansi kebijakan LCS dan bagaimana Indonesia memanfaatkan momentum kepemimpinan regional untuk membangun fondasi pembayaran digital yang tidak bergantung pada mata uang dan infrastruktur keuangan global.

Referensi ketiga merujuk pada artikel jurnal berjudul "*The Politics of International Cooperation in Cross-border Digital Payment Connectivity: A Case Study of QR Payment System in ASEAN*" oleh Azza Bimantara dan Rangga Tri Nugraha.<sup>20</sup> Artikel ini menjelaskan kontribusi empiris dan teoritis dengan menggunakan pendekatan teori interdependensi kompleks yang dikembangkan oleh Keohane dan Nye untuk menganalisis bagaimana mekanisme kelembagaan ASEAN memungkinkan terciptanya integrasi keuangan digital yang bersifat inklusif dan berdaulat, terutama dalam persaingan geopolitik dan ekonomi global. Artikel ini membahas keberhasilan ASEAN, di bawah kepemimpinan Indonesia pada tahun 2023, dalam menginisiasi sistem pembayaran QR-code lintas batas yang tidak hanya memperkuat konektivitas digital antar negara anggota, tetapi juga membawa inovasi berupa penerapan mekanisme penyelesaian transaksi menggunakan mata uang lokal *local currency settlement* (LCS). Penerapan LCS menjadi bentuk nyata dari upaya mengurangi ketergantungan sistem pembayaran regional terhadap dominasi mata uang dolar AS, yang selama ini mendominasi

<sup>19</sup> Fernando, J., & Turnip, E. Y. (2023). Peluang Indonesia sebagai Ketua ASEAN Tahun 2023 dalam Mempromosikan Penggunaan Local Currency Settlement dan QR Code Lintas Batas terkait Transaksi Perdagangan di Asia Tenggara. *Jurnal Ilmu Sosial*, 4(2), 23-31. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/Sentris/article/view/7124>

<sup>20</sup> Bimantara, A., & Nugraha, R. T. (2025). *The Politics of International Cooperation in Cross-border Digital Payment Connectivity: A Case Study of QR Payment System in ASEAN*. *Sospol*, 11(1). <https://ejournal.umj.ac.id/index.php/sospol/article/view/38367>

sistem keuangan internasional. ASEAN yang menekankan pendekatan non-militer dan pemberdayaan luas pemangku kepentingan *fintech*, mulai dari sektor privat, pemerintah, hingga lembaga regional, yang telah menciptakan jalur kerja sama *multi aktor* yang efektif. Artikel ini menempatkan fenomena tersebut dalam bingkai geostrategi, di mana kerja sama finansial dan moneter *intra-ASEAN* berperan sebagai instrumen untuk mengelola persaingan geopolitik, juga dapat memperkuat posisi ASEAN sebagai pemain sentral di kawasan Asia Tenggara. Pada aspek kerja sama dan integrasi kelembagaan ASEAN dalam pengembangan sistem pembayaran digital lintas batas sebagai strategi geostrategi dan kedaulatan regional.<sup>21</sup> Artikel ini berkontribusi bagi penulis untuk memberikan fondasi teoritis mengenai bagaimana integrasi QRIS Cross-Border dapat dipahami melalui konsep saling ketergantungan dan kerja sama ekonomi, dan juga dapat memberikan bahwa kebijakan pembayaran digital lintas batas bagian dari diplomasi ekonomi yang berlangsung dalam kerangka regionalisme ASEAN.

Artikel jurnal keempat merujuk pada artikel jurnal berjudul "*QR Cross-Border in Increasing Financial Integration in ASEAN*" yang ditulis oleh Endyastuti Pravitasari, Virgo Simamora, & Indah Novitasari 2023.<sup>22</sup> Artikel ini membahas secara mendalam tentang QRIS Cross-Border sebagai instrumen untuk meningkatkan integrasi keuangan di kawasan ASEAN. Dengan memanfaatkan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR Code, QRIS memungkinkan transaksi antar negara-negara ASEAN dilakukan menggunakan mata uang lokal tanpa

<sup>21</sup> Bimantara, A., dan Nugraha, R. T, "The politics of international cooperation in cross-border digital payment connectivity: A case study of QR payment system in ASEAN," Sospol: Jurnal Sosial Politik 11 no. 1 (2025):82-99. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/sospol/article/view/38367>

<sup>22</sup> Pravitasari, E., Simamora, V., & Novitasari, I. (2023). QR Cross-Border in Increasing Financial Integration in ASEAN. Diakses dari <https://www.scitepress.org/Papers/2023/125823/125823.pdf>

melalui dolar AS sebagai perantara. Selain itu, artikel ini juga menjelaskan bagaimana QRIS Cross-Border membantu negara-negara ASEAN mengurangi ketergantungan mereka pada infrastruktur pembayaran global yang dikuasai oleh perusahaan asing seperti Visa dan Mastercard. Penulis menekankan bahwa QRIS bukan hanya berfungsi sebagai alat pembayaran digital, tetapi juga sebagai bagian dari strategi financial statecraft Indonesia untuk mengurangi dominasi dolar AS dalam transaksi internasional.<sup>23</sup> Artikel ini berkontribusi bagi penulis dalam menjelaskan bagaimana QRIS Cross-Border berperan tidak hanya dalam penguatan sistem pembayaran domestik Indonesia, tetapi juga dalam memperluas pengaruh Indonesia di kawasan Asia Tenggara dengan menciptakan sistem pembayaran yang lebih inklusif dan terkontrol oleh Indonesia.

Referensi terakhir yaitu artikel jurnal berjudul “*Dampak QRIS terhadap Kedaulatan Digital Indonesia dan Hubungan Perdagangan Internasional*” oleh Pitri Yani 2025.<sup>24</sup> Artikel jurnal ini mengkaji QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) sebagai inovasi sistem pembayaran digital nasional yang diciptakan oleh Bank Indonesia. Tujuan utama dari implementasi QRIS untuk memperkuat kedaulatan digital Indonesia dengan mengurangi ketergantungan pada sistem pembayaran internasional seperti Visa dan Mastercard, yang selama ini menguasai transaksi digital serta menyimpan data di luar negeri. QRIS mengintegrasikan berbagai platform pembayaran dalam satu standar QR code, yang tidak hanya mempermudah transaksi domestik, khususnya untuk UMKM, tetapi

<sup>23</sup> Pravitasari, E., Simamora, V., & Novitasari, I. (2023). QR Cross-Border in Increasing Financial Integration in ASEAN, 182-198. Diakses dari <https://www.scitepress.org/Papers/2023/125823/125823.pdf>

<sup>24</sup> Yani, P. (2025). Dampak QRIS terhadap Kedaulatan Digital Indonesia dan Hubungan Perdagangan Internasional. Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah dan Pajak, 2(2).

juga memperkuat kontrol negara atas aliran data transaksi dan infrastruktur keuangan. Kebijakan ini dilihat sebagai langkah penting untuk menjaga kedaulatan ekonomi nasional, dengan menekan biaya transaksi yang sebelumnya dibebankan oleh perusahaan-perusahaan asing. Namun, penerapan QRIS juga memunculkan kritik, terutama dari Amerika Serikat, yang menilai bahwa kebijakan ini membatasi akses bagi perusahaan asing dan menghalangi perdagangan internasional. Amerika Serikat menganggap kebijakan ini sebagai penghalang bagi perusahaan-perusahaan pembayaran internasional, sementara Indonesia menegaskan bahwa QRIS dirancang untuk melindungi kepentingan nasional sambil membuka peluang kerja sama internasional yang lebih adil. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan deskriptif kualitatif untuk menganalisis kebijakan QRIS, dampaknya terhadap kedaulatan digital Indonesia, serta implikasinya dalam hubungan perdagangan internasional. Penelitian ini menunjukkan bahwa QRIS berperan sangat penting dalam mempercepat transformasi digital UMKM, meningkatkan inklusi keuangan, dan memperkuat posisi Indonesia dalam keuangan digital global. Penulis menekankan bahwa QRIS tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi, tetapi juga sebagai simbol kemandirian digital Indonesia dalam menghadapi tantangan globalisasi dan dominasi perusahaan multinasional.<sup>25</sup> Artikel ini berkontribusi bagi penulis menjelaskan bagaimana QRIS memperkuat kedaulatan digital Indonesia dan membantu Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada sistem pembayaran internasional yang terpusat pada negara-negara besar, seperti Amerika Serikat. QRIS juga diposisikan sebagai bagian dari strategi diplomasi

---

<sup>25</sup> Yani, P. (2025). Dampak QRIS terhadap Kedaulatan Digital Indonesia dan Hubungan Perdagangan Internasional. Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah dan Pajak, 2(2), 36-44.

ekonomi digital Indonesia, yang memperkuat posisi tawar negara dalam sistem keuangan internasional.

## 1.7 Kerangka Konseptual

### 1.7.1 Financial Statecraft

*Financial Statecraft* merujuk teori yang dikembangkan oleh Leslie Elliott Armijo untuk menjelaskan bagaimana negara terutama negara berkembang dan *emerging powers* menggunakan instrumen keuangan sebagai alat untuk mencapai tujuan strategis di arena internasional.<sup>26</sup> Negara berkembang merujuk pada negara-negara yang posisinya masih lemah dan rentan dalam sistem keuangan global. Negara-negara ini memiliki keterbatasan dalam kekuatan ekonomi dan finansial, sehingga strategi yang digunakan dalam hubungan keuangan internasional bersifat *defensif* untuk melindungi stabilitas ekonomi domestik. Negara dapat melakukan berupa kontrol modal, nasionalisasi investasi asing, hingga utang sebagai upaya dalam mempertahankan otonomi ekonomi dari tekanan negara kreditor dan pasar global. Namun, seiring perubahan distribusi kemampuan material global, sebagian negara berkembang mengalami peningkatan kekuatan ekonomi. Negara-negara berkembang ini dikategorikan sebagai *emerging powers*, yaitu negara yang mulai memiliki kapasitas finansial dan politik internasional untuk mempengaruhi strategi ekonomi negara lain maupun arah tata kelola keuangan global. Mereka tidak lagi berfokus pada perlindungan diri, tetapi mampu memperluas instrumen diplomasi keuangannya hingga ke tingkat *ofensif* dan sistemik dalam sistem internasional. *Emerging powers* memperoleh kekuatannya dari peningkatan cadangan finansial,

---

<sup>26</sup> Leslie Elliott Armijo, "Theorizing the Financial Statecraft of Emerging Powers," dalam Theorizing the Financial Statecraft of Emerging Powers, disunting oleh Leslie Elliott Armijo dan Saori N. Katada (New York: Routledge, 2014), 42-47.

kemampuan investasi luar negeri, serta peran yang semakin besar dalam institusi internasional. Kemudian juga semakin aktif dalam menyuarakan kepentingannya di forum global dan menuntut perubahan arsitektur keuangan internasional yang sebelumnya didominasi kekuatan tradisional Barat.<sup>27</sup>

Dengan demikian, *emerging powers* dipandang sebagai bagian dari negara berkembang, tetapi memiliki status yang lebih tinggi karena telah menunjukkan kapasitas mempengaruhi sistem keuangan global, bukan hanya beradaptasi terhadapnya. Dalam kerangka Armijo, perbedaan utama antara keduanya terletak pada kapabilitas material, kemandirian finansial, serta kemampuan memproyeksikan kekuasaan ekonomi ke luar negeri.<sup>28</sup> Teori ini memandang bahwa instrumen finansial, seperti kebijakan moneter, arsitektur pembayaran, pengelolaan mata uang, kontrol modal, dan jaringan keuangan internasional, bukan hanya sebagai mekanisme teknis ekonomi semata. Instrumen-instrumen tersebut diposisikan sebagai perangkat politik yang dapat memperkuat posisi negara, melindungi kedaulatan ekonomi, dan memengaruhi aktor lain dalam sistem global.<sup>29</sup> Armijo menekankan bahwa negara-negara tidak lagi sepenuhnya pasif atau hanya mengikuti struktur keuangan global yang hierarkis di era globalisasi finansial. Negara-negara, termasuk yang tidak berstatus hegemon, dapat memanfaatkan celah strategis dalam sistem keuangan internasional untuk mengurangi kerentanan, meningkatkan otoritas, dan meningkatkan kapasitas domestik mereka.<sup>30</sup> Oleh karena itu, *financial statecraft* hadir sebagai memahami

---

<sup>27</sup> Leslie Elliott Armijo dan Saori N. Katada, *Theorizing the Financial Statecraft of Emerging Powers* (New York: Routledge, 2014), 45-50.

<sup>28</sup> Leslie Elliott Armijo dan Saori N. Katada, *Theorizing the Financial Statecraft of Emerging Powers* (New York: Routledge, 2014), 48.

<sup>29</sup> Armijo dan Katada, *Theorizing the Financial Statecraft*, 42-47.

<sup>30</sup> Armijo and Katada, *Theorizing Financial Statecraft*, 47.

bagaimana negara-negara memanfaatkan instrumen finansial dalam tatanan moneter internasional. Armijo menjelaskan bahwa strategi *defensive* dan *offensive* muncul sebagai respons negara terhadap ketidaksetaraan struktural dalam sistem keuangan global. Sistem moneter internasional pada dasarnya bersifat hierarkis, di mana mata uang tertentu terutama dolar Amerika Serikat memiliki posisi utama dalam perdagangan global, cadangan devisa, dan settlement internasional.<sup>31</sup> Hal ini menjadi ketergantungan yang tinggi terhadap mata uang asing, yang dapat menghambat kebijakan moneter domestik. Kemudian dominasi infrastruktur pembayaran global oleh aktor negara besar dan perusahaan multinasional. Kerentanan negara berkembang terhadap krisis finansial, arus modal spekulatif, dan perubahan kebijakan moneter negara besar. Keterbatasan ruang kebijakan, karena negara harus menyesuaikan diri dengan standar internasional yang tidak selalu sesuai dengan kondisi domestik.

Dengan demikian, strategi defensif muncul sebagai bentuk pertahanan, sedangkan strategi *ofensif* hadir sebagai bentuk ambisi untuk memperoleh ruang pengaruh yang lebih besar dan mengurangi ketimpangan struktural tersebut. Armijo membagi *Financial Statecraft* menjadi dua dimensi utama, yaitu *defensive* dan *offensive*. Kedua dimensi ini menggambarkan bagaimana negara merespons tekanan eksternal sekaligus dapat memanfaatkan peluang dalam struktur keuangan internasional yaitu:<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Armijo and Katada, *Theorizing Financial Statecraft*, 48.

<sup>32</sup> Armijo and Katada, *Theorizing Financial Statecraft*, 49.

### *1. Dimensi Defensive*

Dimensi defensif dalam kerangka Armijo merujuk pada upaya negara untuk mengurangi kerentanan eksternal dan mempertahankan otonomi kebijakan domestik di tengah dominasi struktur keuangan global. Strategi ini bersifat protektif dan bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional tanpa melakukan konfrontasi langsung terhadap aktor hegemon. Dalam strategi *defensive*, negara dapat melakukan berbagai tindakan, seperti:

#### 1. Kebijakan Moneter dan Nilai Tukar

Upaya negara untuk mengatur peredaran uang, suku bunga, dan nilai tukar mata uang domestik. Termasuk intervensi pasar, manajemen volatilitas, dan penguatan mata uang domestik sebagai alat stabilisasi dan pengaruh.

#### 2. Pengelolaan Arus Keuangan Lintas Batas

Dalam perspektif Armijo, kontrol negara atas arus keuangan tidak selalu diwujudkan melalui pembatasan langsung atau larangan arus modal. Negara juga dapat melakukan pengelolaan struktural terhadap arus keuangan lintas batas melalui pengaturan mekanisme transaksi, kanal pembayaran, dan sistem settlement. Pendekatan ini memungkinkan negara mengurangi eksposur terhadap volatilitas eksternal serta meningkatkan kemampuan monitoring tanpa harus menerapkan kontrol modal keras.

#### 3. Arsitektur dan Infrastruktur Pembayaran

Melibuti sistem penyelesaian transaksi lintas batas, standar teknis, jaringan kliring, serta infrastruktur digital yang dapat memperkuat otonomi finansial. Menguasai

aliran data dan transaksi keuangan di dalam negeri. Mengurangi ketergantungan pada jaringan internasional seperti Visa, Mastercard, atau SWIFT.

#### 4. Cadangan Devisa dan Manajemen Risiko

Penggunaan cadangan devisa sebagai alat stabilisasi dan simbol kredibilitas ekonomi. Dengan memiliki simpanan mata uang asing atau aset likuid yang digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Strategi *defensive* merujuk pada sifat protektif negara, yaitu upaya untuk mengurangi *vulnerability* terhadap dinamika global yang tidak selalu dapat dikendalikan.

##### 1. *Dimensi Ofensif*

Dimensi *ofensif* merujuk pada penggunaan instrumen keuangan sebagai alat untuk memperluas pengaruh negara dalam sistem global. Negara tidak hanya bertahan, tetapi juga berupaya menjadi pembentuk aturan, penyedia standar, dan penggerak arsitektur finansial internasional. Dalam strategi *ofensif*, negara dapat melakukan dengan:

###### 1. Diplomasi Finansial

Negosiasi, aliansi ekonomi, kerja sama multilateral, dan peran negara dalam lembaga-lembaga internasional sebagai sarana mempengaruhi tatanan keuangan global. Upaya negara mempengaruhi aturan, standar, dan arsitektur finansial global melalui negosiasi, aliansi, atau lembaga internasional.

###### 2. *Swap Lines* dan Kerja Sama Keuangan Regional

Negara membangun kerja sama keuangan untuk memperkuat stabilitas eksternal, mengurangi ketergantungan terhadap dolar, atau membentuk jaringan finansial

alternatif. Perjanjian bilateral atau multilateral untuk saling menyediakan likuiditas atau memfasilitasi transaksi keuangan antar negara.

Strategi *ofensif* memberikan ruang bagi negara untuk meningkatkan posisi tawar dan menciptakan pengaruh struktural di tingkat regional maupun global. Armijo menekankan bahwa walaupun negara-negara berkembang tidak memiliki kekuatan setara dengan hegemon, negara tetap memiliki kemampuan untuk membentuk norma dan praktik finansial melalui inovasi kebijakan.

Instrumen-instrumen tersebut menjelaskan bahwa *Financial Statecraft* tidak sebatas kebijakan ekonomi, tetapi juga sebagai strategi politik yang merujuk pada perubahan struktur kekuatan finansial internasional. Dalam penelitian ini, teori *Financial Statecraft* digunakan sebagai kerangka untuk menganalisis bagaimana negara mengelola instrumen keuangan sebagai alat kekuasaan.

Dalam strategi defensif, indikator utamanya untuk melihat sejauh mana negara berupaya mengurangi kerentanan eksternal dan ketergantungan terhadap jaringan keuangan global. Hal ini dapat diamati melalui upaya negara memperkuat kedaulatan data dan infrastruktur pembayaran domestik, dengan mengalihkan pemrosesan transaksi dari jaringan pembayaran asing ke jaringan nasional, serta dapat meningkatkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi lintas batas guna mengurangi ketergantungan pada infrastruktur pembayaran global yang berpusat pada Amerika Serikat. Selain itu, strategi defensif dengan melalui upaya negara memperkuat kemampuan mengurangi ketergantungan, termasuk melalui mitra internasional dan pengembangan instrumen keuangan yang lebih mandiri.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Leslie Elliott Armijo and Saori N. Katada, *Theorizing the Financial Statecraft of Emerging Powers* (New York: Routledge, 2014), 47-50

Dengan demikian, indikator defensif dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana negara membangun perlindungan struktural di tengah dominasi sistem pembayaran global.

Sementara itu, strategi *ofensif* dianalisis melalui indikator yang menunjukkan bagaimana negara berusaha memperluas pengaruhnya dalam arsitektur keuangan regional. Dengan kemampuan negara mengekspor standar keuangan domestik, membangun koneksi pembayaran lintas negara, serta memainkan peran sentral dalam integrasi finansial kawasan. Selain itu, strategi *ofensif* melihat dari diplomasi finansial yang dilakukan negara melalui kerja sama, negosiasi, dan inisiatif multilateral untuk membentuk tatanan keuangan alternatif yang lebih menguntungkan.<sup>34</sup> Indikator *ofensif* melihat bentuk kapasitas negara untuk tidak hanya melindungi kepentingan domestiknya, tetapi juga menjadi aktor yang aktif membentuk struktur keuangan regional.

Sistem keuangan internasional bersifat hierarkis dan ditandai oleh dominasi dolar AS sebagai mata uang utama dalam perdagangan global, penyelesaian transaksi internasional, dan penyimpanan nilai. Dominasi oleh infrastruktur pembayaran global seperti SWIFT, Visa, dan Mastercard yang secara struktural menempatkan negara-negara berkembang pada posisi yang bergantung.<sup>35</sup> Kondisi struktural inilah yang menghasilkan berbagai bentuk kerentanan bagi negara seperti Indonesia, terutama dalam hal keterikatan terhadap jaringan pembayaran asing, keterbatasan penguasaan data transaksi, dan ketergantungan nilai tukar pada mata uang asing. Identifikasi kerentanan ini menjadi tahap awal dalam alur teoretis,

---

<sup>34</sup> Leslie Elliott Armijo and Saori N. Katada, *Theorizing the Financial Statecraft of Emerging Powers* (New York: Routledge, 2014), 49-51.

<sup>35</sup> Leslie Elliott Armijo and Saori N. Katada, *Theorizing the Financial Statecraft of Emerging Powers* (New York: Routledge, 2014), 45-50.

karena melalui titik inilah kebutuhan Indonesia untuk menjalankan strategi *Financial Statecraft* dapat dipahami. Dengan demikian, teori *Financial Statecraft* berfungsi sebagai lensa analitis dalam penelitian ini. Teori ini digunakan penulis untuk memahami bagaimana negara, termasuk Indonesia, menggunakan instrumen finansial sebagai alat strategis dalam menghadapi ketergantungan pada dolar AS dan dominasi sistem pembayaran global. Melalui indikator *defensif* seperti penguatan infrastruktur pembayaran domestik, kontrol modal, dan penggunaan mata uang lokal serta indikator *ofensif* seperti ekspor standar keuangan, pembangunan konektivitas lintas negara, dan diplomasi finansial penelitian ini menganalisis bagaimana QRIS Cross-Border dijalankan sebagai instrumen strategi negara.

## 1.8 Metodologi Penelitian

### 1.8.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menekankan akan analisa data dari teori yang ada dengan sumber data tertulis dari objek yang dapat diamati.<sup>36</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif eksploratif, yang bertujuan mendeskripsikan dan mengeksplorasi fenomena terkait penelitian. Metode ini biasanya digunakan ketika informasi atau data yang tersedia tentang topik yang sedang dipelajari masih terbatas atau bahkan tidak ada.<sup>37</sup> Pendekatan ini digunakan karena topik mengenai penggunaan QRIS Cross-Border sebagai instrumen untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS masih relative baru dan membutuhkan eksplorasi

<sup>36</sup> Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

<sup>37</sup> Ida Bagus Mantra, Filsafat Penelitian & Metode Penelitian Sosial (Pustaka Pelajar, 2004), 37-39.

mendalam terhadap kebijakan, serta strategi negara. Setelah melakukan deskripsi dan analisis yaitu bagaimana Indonesia memanfaatkan QRIS Cross-Border sebagai bagian dari strategi *financial statecraft* guna mengurangi ketergantungan pada rezim keuangan global yang didominasi oleh dolar Amerika Serikat.

### **1.8.2 Batasan Penelitian**

Batasan penelitian ini Untuk lebih memahami tujuan penelitian, diperlukan batasan-batasan yang jelas. Dalam penelitian ini, peneliti membatasi penelitian dengan dua aspek, yaitu batasan waktu yaitu ketika fenomena terjadi dan batasan masalah yang dihadapi dalam penelitian. Batasan masalah dari penelitian ini dengan memfokuskan analisis bagaimana QRIS Cross-Border digunakan sebagai instrumen kebijakan oleh Indonesia untuk mengurangi ketergantungan terhadap dominasi dolar AS dalam sistem keuangan internasional. Sementara itu, batasan waktu ditetapkan sejak tahun 2021 hingga 2025, yaitu periode di mana integrasi QRIS Cross-Border mulai diluncurkan, diperluas, dan mengalami perkembangan signifikan dalam bentuk kerja sama pembayaran lintas batas di Kawasan.

### **1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis**

Dalam penelitian, konsep unit analisis merujuk pada objek yang akan dipelajari dan dianalisis. Sementara itu, unit eksplanasi merujuk pada unit yang berperan dalam mempengaruhi perilaku dari unit analisis tersebut. Selanjutnya, level atau tingkat analisis mengacu pada posisi atau kedudukan dari unit yang menjadi objek kajian, baik itu pada level individu, kelompok, organisasi, atau masyarakat.<sup>38</sup> Dalam penelitian ini, unit analisis yang menjadi fokus kajian yaitu implementasi kebijakan QRIS Cross-Border yang dikembangkan oleh Bank

---

<sup>38</sup> Mohtar Mas'ud, Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin Dan Metodologi (Jakarta: LP3ES, 1990). 35-286.

Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat kedaulatan moneter dan mengurangi ketergantungan pada rezim dolar AS, dianalisis berdasarkan indikator defensif. Adapun unit eksplanasi merujuk pada faktor-faktor yang memengaruhi langkah Indonesia tersebut, seperti struktur keuangan global yang hierarkis, dominasi dolar, perkembangan teknologi pembayaran digital, serta dinamika kerja sama keuangan regional di ASEAN dengan menggunakan indikator *ofensif*. Tingkat analisis yang digunakan ada dua level analisis. Tingkat nasional/domestik yaitu bagaimana Indonesia membangun infrastruktur kebijakan QRIS untuk memperkuat kedaulatan moneter. Pada level negara regional, bagaimana QRIS Cross-Border memperluas pengaruh Indonesia dan mengurangi ketergantungan pada dollar di Kawasan.

#### **1.8.4 Teknik Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan data primer dengan mengumpulkan dokumen resmi dari Siaran Pers BI, ASEAN *Payment Connectivity Framework*, Laporan USTR *National Trade Estimate* (NTE) 2025 dan data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan dari berbagai sumber seperti artikel jurnal akademik terkait QRIS, LCS, integrasi finansial ASEAN, artikel teori *Financial Statecraft*, laporan Lembaga internasional ASEAN, IMF, dan SWIFT, artikel CNBC dan penelitian-penelitian terdahulu yang berkorelasi dengan penelitian ini. Seluruh data sekunder digunakan untuk memperkuat analisis mengenai QRIS Cross-Border dalam strategi *financial statecraft* dan penguatan kedaulatan moneter Indonesia.

### **1.8.5 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam proses pencarian dan kompilasi data sistematis yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan dokumen, serta bagaimana mengatur data ke dalam kategori, memecahnya menjadi unit, melakukan sintesa, menyusun menjadi pola, memilih yang penting dan yang akan dipelajari, dan menarik kesimpulan sehingga dapat dengan mudah dipahami.<sup>39</sup> Dalam menjawab penelitian, penulis mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari dokumen resmi dan laporan institusi yang menjadi objek kajian, meliputi dokumen dari Bank Indonesia seperti Siaran Pers BI, Materi Sosialisasi QRIS (2023), Buku Perkembangan Transaksi Bank Indonesia (PTBI) 2024, Infografik QRIS Antarnegara, Infografis Cadangan Devisa Indonesia (Mei 2025), serta Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025. Selain itu, data primer juga diperoleh dari dokumen ASEAN yang meliputi *ASEAN Payment Connectivity Framework*, *ASEAN Economic Community (AEC) Framework*, *ASEAN Banking Integration Framework (ABIF)*, dan *Local Currency Settlement Framework (LCSF)*. Data primer juga mencakup Laporan *National Trade Estimate (NTE)* 2025 dari *United States Trade Representative (USTR)* serta Statistik QRIS dan QRIS Cross-Border dari Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur akademik, laporan lembaga internasional, dan publikasi media yang relevan dengan topik penelitian. Artikel jurnal akademik yang digunakan meliputi penelitian dari Saleh dan Marzaman mengenai peran QRIS dan GPN sebagai instrumen kedaulatan digital Indonesia, penelitian Jason Fernando

---

<sup>39</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan RD (Bandung, Indonesia: Alfabeta, 2013).

dan Ezra Yora Turnip (2023) tentang peluang Indonesia dalam mempromosikan *Local Currency Settlement* di ASEAN, penelitian Azza Bimantara dan Rangga Tri Nugraha mengenai politik kerja sama internasional dalam konektivitas pembayaran digital ASEAN, penelitian Endyastuti Pravitasari, Virgo Simamora, dan Indah Novitasari (2023) tentang QRIS Cross-Border dalam integrasi finansial ASEAN, serta penelitian Pitri Yani (2025) mengenai dampak QRIS terhadap kedaulatan digital Indonesia. Data sekunder juga bersumber dari laporan lembaga internasional seperti *International Monetary Fund (IMF)* yang menyediakan COFER Dataset dan data perdagangan global, SWIFT yang menyediakan RMB Tracker dan data pangsa mata uang dalam pembayaran global (2025), World Bank yang menyediakan data biaya remittance dan volatilitas nilai tukar, *Asian Development Bank (ADB)* yang menyediakan data perdagangan ASEAN berbasis dolar AS, serta Bank for International Settlements (BIS) yang mendokumentasikan Proyek NEXUS. Publikasi media massa seperti CNBC Indonesia dan platform berita ekonomi lainnya juga digunakan untuk melengkapi informasi terkait perkembangan QRIS Cross-Border dan kebijakan pembayaran digital. Seluruh data sekunder tersebut dianalisis menggunakan kerangka teori dari Leslie Elliott Armijo sebagai landasan konseptual utama penelitian ini.

## 1.9 Sistematika Penelitian

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, jenis dan pendekatan penelitian, unit dan tingkat analisis, Teknik pengumpulan data, dan Teknik analisis data.

## **BAB II : STRUKTUR DAN SISTEM PEMBAYARAN INTERNASIONAL YANG DI DOMINASI DOLAR AS SERTA POSISI INDONESIA**

Pada bab ini membahas bagaimana Amerika Serikat mempertahankan dominasinya dalam sistem keuangan internasional melalui peran dolar AS sebagai mata uang utama dalam perdagangan global, cadangan devisa, dan *settlement* lintas batas. Bab ini juga menjelaskan bagaimana dominasi tersebut diperkuat oleh penguasaan AS atas infrastruktur pembayaran internasional seperti SWIFT, Visa, Mastercard, dan sistem *clearing settlement* berbasis dolar.

## **BAB III : PERKEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI QRIS CROSS-BORDER DI INDONESIA**

Pada bab ini membahas perkembangan, implementasi implikasi QRIS Cross-Border oleh Bank Indonesia, mekanisme kerja teknis, proses integrasi dengan negara-negara ASEAN, serta perkembangan *local currency transaction* (LCT). Bab ini juga membahas bagaimana QRIS Cross-Border menjadi bagian dari agenda konektivitas pembayaran regional dan strategi Indonesia dalam membangun kemandirian sistem pembayaran digital di tengah dominasi aktor global.

## **BAB IV : ANALISIS QRIS CROSS-BORDER SEBAGAI STRATEGI FINANCIAL STATECRAFT DALAM MENGURANGI DOMINASI AMERIKA SERIKAT DI SISTEM KEUANGAN INTERNASIONAL**

Pada bab ini menyajikan hasil analisis utama penelitian menggunakan teori *Financial Statecraft* untuk menjelaskan bagaimana QRIS Cross-Border digunakan sebagai instrumen strategis oleh Indonesia. Pembahasan meliputi upaya penguatan penggunaan mata uang lokal, peningkatan kontrol atas data transaksi, pengurangan ketergantungan pada jaringan pembayaran asing, serta perluasan ruang kebijakan

moneter melalui digitalisasi pembayaran lintas negara. Bab ini juga mengevaluasi peluang, tantangan, dan implikasi kebijakan tersebut bagi posisi strategis Indonesia dalam sistem keuangan internasional.

## BAB V : PENUTUP

Bab ini adalah bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan topik yang telah diteliti.

